



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SALWATI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 732077

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 800.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 120.000.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AGYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 9.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 158.809.076 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 1.087.809.076 |
| III. HUTANG | Rp. | 687.145.800 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 400.663.276 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YONG FARMANTA
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 887106

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 70.000.000 |
| 1. MOBIL, FORD/RANGER PICKUP DOUBLE CABIN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 1.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 71.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 71.000.000 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKE YUDI WINARNI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 495115

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 3.500.000 |
| 1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI | Rp. | |
| 3.500.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 3.063.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 16.702.722 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 23.265.722 |
| III. HUTANG | Rp. | 1.650.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 21.615.722 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSTANHADI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 859361

II. DATA HARTA

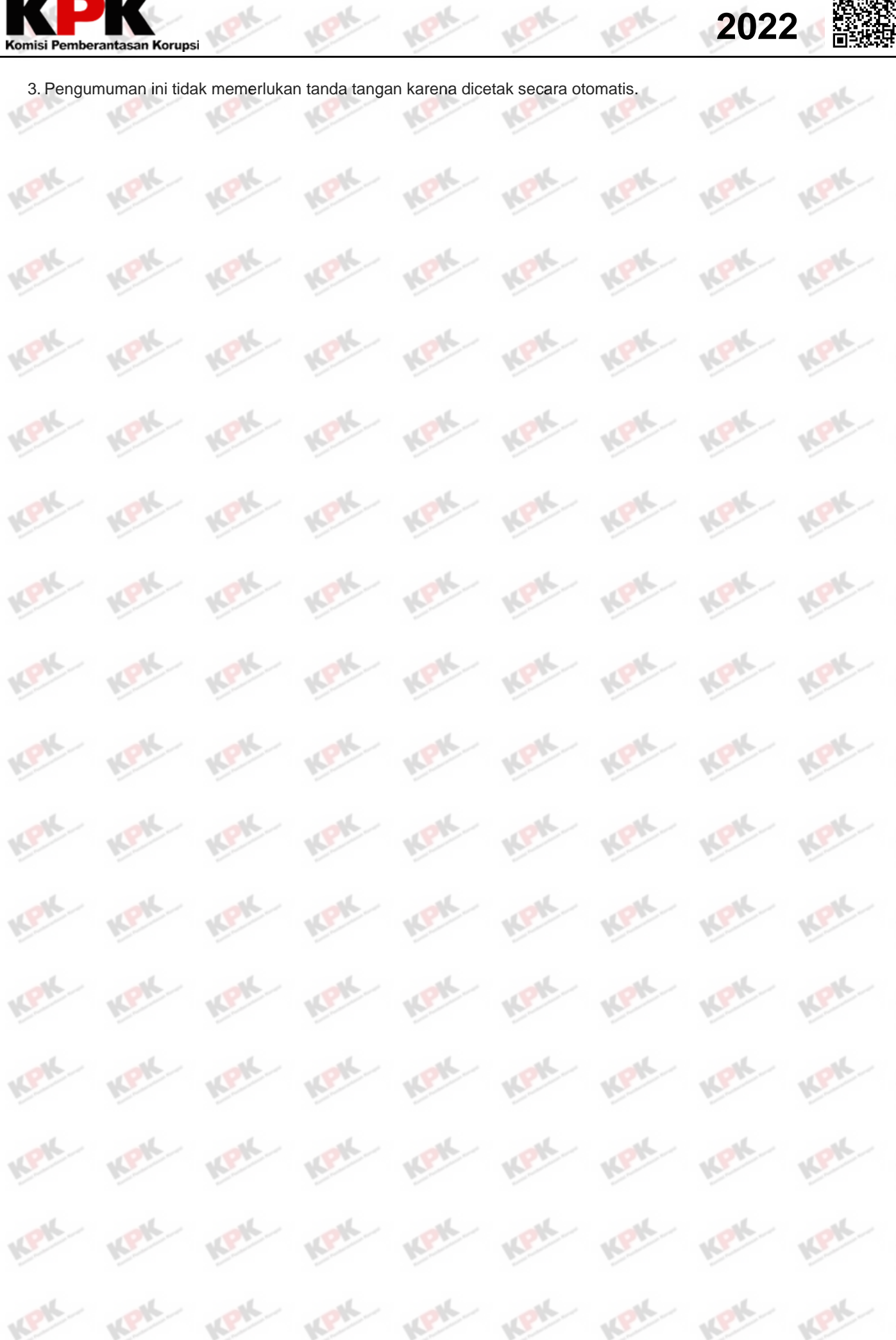
| | | |
|---|-----|--------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 199.750.000 |
| 1. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 159.750.000 | | |
| 2. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 7.500.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS KONDISI RUSAK Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | --- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 174.345 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 207.424.345 |
| III. HUTANG | Rp. | 134.147.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 73.277.345 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI FATIMAH
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 257588

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 485.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 233.500.000 |
| 1. MOTOR, HONDA NF1182D1M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000 | | |
| 2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS R/DELUXE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 5.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 723.500.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 98.978.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 624.522.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YESI FRANSISKA
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 436868

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 120.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 103.300.000 |
| 1. MOTOR, ZONGSING SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 300.000 | | |
| 2. MOBIL, DAIHATSU F60IRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA AFP12W21C08 M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 102.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 325.300.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 24.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 301.300.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.